

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara wajib menjamin kesejahteraan setiap penduduknya dan setiap penduduk berhak untuk mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan penduduk memberikan pengaruh yang besar pada sistem politik, ekonomi, dan sebagainya. Tingkat kesejahteraan penduduk pada suatu Negara menunjukkan seberapa berhasil suatu Negara dalam mencapai tujuannya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pemerintah melaksanakan berbagai program peningkatan kesejahteraan penduduk. Namun, terkadang program peningkatan kesejahteraan penduduk tidak berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan tidak tepatnya sasaran yang disebabkan oleh data identifikasi target yang kurang akurat. Seringkali ditemukan terjadi kesalahan dalam menentukan kelayakan penerimaan bantuan. Masalah seperti ketidaktepatan sasaran penerimaan bantuan ini tentunya harus segera diatasi dan dicari solusinya agar tidak terulang lagi pada program-program bantuan di masa yang akan datang.

Tingkat kesejahteraan rakyat menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam menentukan siapa saja yang perlu diberikan bantuan. Akan tetapi, sepertinya kesejahteraan rakyat tidak digunakan sebagai indikator dalam menentukan penerima bantuan sosial. Banyak pihak menduga bahwa penilaian terhadap penerima bantuan sosial yang terjadi saat ini bersifat objektif karena hal ini dipengaruhi oleh adanya rasa suka dan tidak suka atau adanya kedekatan hubungan

penerima bantuan sosial dengan pihak-pihak yang dianggap bertanggungjawab dalam menentukan data penerima bantuan sosial.

Hal ini akan menyebabkan timbulnya permasalahan yang baru. Yaitu masalah sosial yang akan berdampak kepada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial. Karena bantuan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat yang membutuhkan. Jika mereka tidak mendapatkan hal tersebut maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang akan menambah angka kemiskinan.

Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.

Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.

Salah satu masalah sosial yang masih terjadi sampai saat ini yaitu kemiskinan. Dalam kajian sosiologi pembangunan, konsep kemiskinan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama kemiskinan absolut (*a fixed yardstick*). Konsep kemiskinan absolut ini dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang kongkit. Ukuran ini lazimnya berorientasi pada kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pangan, papan dan sandang. Besarnya ukuran setiap negara berbeda.

Kedua, kemiskinan relatif (*the idea of relative*). Konsep kemiskinan relatif ini dirumuskan berdasarkan atau memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Asumsi ini, bahwa kemiskinan di daerah satu dengan daerah lain tidak sama, demikian juga antara waktu dulu dengan sekarang

berbeda. Ketiga, kemiskinan subjektif. Konsep kemiskinan subjektif ini dirumuskan berdasarkan perasaan individu atau kelompok miskin.

Kita menilai individu atau kelompok tertentu miskin, tetapi kelompok yang kita nilai menganggap bahwa dirinya bukan miskin, atau sebaliknya. Konsep kemiskinan ketiga inilah yang lebih tepat apabila memahami konsep kemiskinan dan bagaimana langkah strategis dalam menangani kemiskinan (Usman, S. 1998; Tjokrowinoto, W. 2004).

Kemiskinan ini menjadi salah satu masalah sosial yang sampai saat ini masih menjadi topik utama. Masalah sosial ini tentunya akan terjadi dimana saja, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Di setiap wilayah yaitu pedesaan dan perkotaan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun dengan adanya persepsi dua wilayah, perkotaan dan pedesaan seharusnya bukan menjadi perbedaan prioritas pemerintah untuk menjalankan kewajibannya untuk membangun wilayah negara menjadi lebih maju. Begitu juga seluruh masyarakat yang ada di wilayah itu.

Permasalahan yang ada dalam masyarakat desa pada umumnya adalah rendahnya taraf hidup masyarakat sehingga banyak terdapat keluarga miskin, kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup yang layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain. Kemiskinan bersifat multidimensional, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 146 / HUK / 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, terdiri atas 14 Kriteria Kemiskinan.

Kriteria Kemiskinan Menurut KEMENSOS RI, meliputi: (1) Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal Kurang dari 8 M² per Orang. (2) Jenis Lantai Tempat Tinggal Terbuat dari Tanah/Bambu/Kayu Murahan. (3) Jenis Dinding Tempat Tinggal dari Bambu/Rumbia/Kayu Berkualitas Rendah/Tembok Tanpa Diplester. (4) Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar/Bersama-sama dengan Rumah Tangga Lain. (5) Sumber Penerangan Rumah Tangga tidak Menggunakan Listrik. (6) Sumber Air Minum berasal dari Sumur/Mata Air tidak terlindung/Sungai/Air Hujan. (7) Bahan Bakar untuk Memasak sehari-hari adalah Kayu Bakar/Arang/Minyak Tanah.

(8) Hanya Mengonsumsi Daging/Susu/Ayam dalam satu kali Seminggu. (9) Hanya Membeli Satu Stel Pakaian Baru dalam Setahun. (10) Hanya Sanggup Makan Sebanyak Satu/Dua Kali dalam Sehari. Tidak (11) Membayar Biaya Pengobatan di Puskesmas/Poliklinik. (12) Sumber Penghasilan Kepala Rumah Tangga adalah: Petani dengan Luas Lahan 500 M², Buruh Tani, Nelayan, Buruh Bangunan, Buruh Perkebunan dan atau Pekerjaan Lainnya dengan Pendapatan dibawah Rp. 600.000- per Bulan. (13) Pendidikan Tertinggi Kepala Rumah Tangga: Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD/Tamat SD. (14) Tidak Memiliki Tabungan/Barang yang Mudah dijual dengan Minimal Rp. 500.000,- seperti Sepeda Motor Kredit/Non Kredit, Emas, Ternak, Kapal Motor, atau Barang Modal Lainnya.

Kemiskinan sampai saat ini masih merupakan salah satu permasalahan sosial di Indonesia yang masih menjadi permasalahan utama. Angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi, dan posisinya selalu menempati ranking tertinggi diantara permasalahan sosial lainnya. Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan September 2017 mencatat penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yaitu 27,77 juta orang(10,64 persen).

Berdasarkan data dari BPS tersebut, terlihat ada penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode Maret September 2017, namun faktanya apabila dilihat langsung, seolah tidak terjadi perubahan, jumlah penduduk miskin baik di perkotaan maupun di pedesaan tidak menunjukkan penurunan. Bahkan, terkesan bahwa dari waktu ke waktu angka kemiskinan di Indonesia cenderung bertambah, sementara banyak pihak berpendapat bahwa kemiskinan merupakan akar masalah dari semua permasalahan sosial di Indonesia, yang salah satunya adalah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). Banyak perempuan di Indonesia menjadi miskin.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 08 Tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial jenis, definisi dan kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial I (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu salah satunya adalah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) :

Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kriteria : (1) Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan). (2) Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan. (3) Menjadi pencari nafkah utama keluarga. (4) Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, Idris dan Selvaratnam (2012) menyebutkan bahwa insiden kemiskinan baik secara relatif atau absolut adalah tinggi dikalangan wanita terutama bagi wanita yang menjadi kepala rumah tangga. Bagi wanita yang bercerai hidup atau mati, mereka bisa menjadi miskin serta merta jika terpaksa menanggung anak tanpa nafkah atau harta yang ditinggalkan. Kemiskinan seringkali terjadi dikalangan ibu tunggal karena

sulitnya mendapatkan pekerjaan, oleh karena itu pengentasan kemiskinan dikalangan ibu tunggal menjadi perhatian dari pemerintah.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>

PRSE merupakan kelompok rentan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya/mengatasi masalahnya, tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan/kekuatan. Ketidakberdayaan PRSE disebabkan karena tidak memiliki pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, tidak mampu mengakses sumber dan tingkat partisipasi yang rendah.

Melihat dari data yang sudah disajikan diatas, seperti data angka kemiskinan yang tidak menandakan jumlah yang sedikit, ini dapat disimpulkan bahwa salah satu masalah sosial yang ada yaitu Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) masih butuh penanganan yang lebih serius lagi, seperti melakukan sosialisasi untuk hal seperti pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja dll untuk melatih mereka agar tidak mengalami terus-menerus kesulitan dalam menjalankan hidupnya.

Fokus dalam kajian ini adalah kemiskinan pada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), **Harini dan Listyaningsing (2000)** menjelaskan wanita kepala rumah tangga adalah wanita yang dianggap bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, yaitu: (1) wanita tidak kawin yaitu wanita yang tidak terikat dengan perkawinan dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya; (2) wanita kawin yaitu wanita yang terikat dalam perkawinan tetapi tempat tinggalnya terpisah dengan suami sehingga wanita tersebut mengepalai rumah tangganya; (3) wanita cerai hidup atau cerai mati dan belum menikah lagi dan tidak kembali ke keluarga yang melahirkan atau mertua.

Masalah yang dihadapi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) ini tentu saja adalah kemiskinan. Kemiskinan yang mereka alami seperti, sulitnya untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari mereka agar tetap bisa bertahan hidup. Apalagi bila mereka mempunyai anak yang harus dicukupi kebutuhannya. Keterampilan yang tidak mereka miliki mengakibatkan mereka sulit untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan, karena pendidikan mereka yang rendah. Apabila hal nya mereka mendapatkan pekerjaan tapi dengan upah yang tidak sesuai karena keterbatasan keterampilan dan pendidikan. Maka dari itu perlu ada yang menjembatani antara Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) agar dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan salah satu aspek pendukung yaitu dukungan sosial yang diberikan untuk para Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE).

Dengan banyaknya jumlah kasus kemiskinan yang dialami perempuan wanita rawan social ekonomi (PRSE) berdasarkan data diatas maka perlu adanya upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Agar tidak menimbulkan masalah lain yang lebih mengkhawatirkan. Seperti contoh, jika kemiskinan terus saja meningkat akan banyak terjadi kasus kejahatan di tengah masyarakat.

Kejahatan tersebut seperti, pencurian, penipuan dan masalah lainnya yang akan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat yang terkena dampak kejahatan tersebut. Ini bisa terjadi karena kebutuhan hidup mereka yang tidak bisa terpenuhi. Maka dari itu pentingnya bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat itu harus tepat sasaran dan memenuhi kriteria penerima manfaat yang sudah dijelaskan dalam undang-undang.

Dengan banyaknya jumlah kasus kemiskinan berdasarkan data diatas maka perlu adanya upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Agar tidak menimbulkan masalah lain yang lebih mengkhawatirkan. Upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah Program Bantuan Sosial Tunai (BST).

Program Bantuan Sosial Menurut Kementerian Sosial (2011), bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan tujuan dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu

komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah. Program ini merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pada tanggal 8 Juli 2020 Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 mengalami perubahan menjadi Keputusan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2020, sumber usulan data yang semula merupakan usulan data pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi:

1. Sumber usulan data untuk bantuan sosial sembako berasal dari Pemerintah daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta; Pemda Kabupaten Bogor oleh Bupati Bogor; Pemda Kota Depok oleh Wali kota Depok; Pemda Kota Tangerang oleh Wali kota Tangerang; Pemda Kota Tangerang Selatan oleh Wali Kota Tangerang Selatan dan sumber data lain yang didaftarkan Kementerian Sosial. Sumber data lain ini harus di daftarkan pada masing-masing unit kerja eselon I dan selanjutnya diajukan kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

2. Sumber usulan data bantuan sosial tunai berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial; pemerintah daerah kabupaten/kota dan sumber data lain. Sumber data lain harus disampaikan kepada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial untuk ditetapkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

Selain dengan program bantuan dari pemerintah ini, masyarakat sekitar juga seharusnya bisa ikut andil dalam membantu sesama. Dalam kasus ini yaitu Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang menjadi topik utama permasalahan ini. Hal yang bisa dilakukan oleh

masyarakat sekitar yaitu dukungan sosial, dukungan sosial ini menjadi salah satu hal yang penting dalam membantu program pemerintah yang sedang dilaksanakan.

Dukungan sosial adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh individu satu kepada individu yang lain. Bentuk bantuan yang dimaksud adalah bentuk bantuan yang terlihat dan pemberian rasa cinta, kasih sayang dan kenyamanan kepada seseorang. Dalam islam dukungan sosial disebut dengan tolong menolong (Ta'awun).

Menurut Sarafino (2011:81) dukungan sosial sebagai suatu kenyamanan, perhatian, <https://puspensos.kemensos.go.id/mengenal-bantuan-sosial-lebih-jauh>

penghargaan ataupun bantuan yang diterima individu dari orang lain maupun kelompok. Dalam pengertian lain menurut Casel (dalam Amie Ristianti, 2009:12) disebutkan bahwa dukungan sosial adalah kehadiran orang lain yang dapat membuat individu percaya bahwa dirinya dicintai, diperhatikan dan merupakan bagian dari kelompok sosial, yaitu keluarga, rekan kerja dan teman dekat.

Aspek-aspek Dukungan Sosial pada dasarnya menurut Cutrona & Gardner (dalam Sarafino, 2011:81), terdapat lima bentuk dukungan sosial yaitu: dukungan emosional (dukungan dalam bentuk kasih sayang, penghargaan, perasaan didengarkan, perhatian dan kepercayaan), dukungan penghargaan (dukungan dalam bentuk penilaian, penguatan dan umpan balik), dukungan informasi (dukungan dalam bentuk informasi, nasehat dan saran), dukungan instrumental (sarana yang tersedia untuk menolong individu melalui waktu, uang, alat, bantuan dan pekerjaan), dukungan kelompok (keterlibatan dan pengakuan sebagai bagian dari kelompok yang memiliki minat aktivitas sosial yang sama). (Dianto, 2017)

Peran tokoh masyarakat yang diteliti berkaitan dengan gambaran dari pelaksanaan fungsi dan tugasnya yang mengacu pada pendapat Mansyur (1986:103), yaitu: 1) Fungsi Merencanakan. Seorang tokoh masyarakat tentunya merasa berkewajiban dalam tugasnya di dalam masyarakat, maka harus bisa merencanakan segala sesuatunya di dalam masyarakat.

Misalnya, dalam merencanakan terciptanya kesejahteraan pada warganya, keamanan maupun hal lainnya dalam masyarakatnya. 2) Fungsi Mengontrol. Tugas mengontrol erat kaitannya dengan pelaksanaan dari suatu kesepakatan bersama/rencana bersama, yaitu meminimalkan kesalahan. Tokoh masyarakat harus mampu bertindak tegas agar warganya tidak berbuat kesalahan-kesalahan kembali serta mau membimbingnya kembali agar kesepakatan-kesepakatan/rencana bersama tersebut dapat berjalan dengan baik.

3) Fungsi Menggerakkan. Menggerakkan merupakan hal terpenting yang harus dilakukan oleh tokoh masyarakat, sebab walaupun rencana tersusun dengan baik dan orang-orang maupun perlengkapan telah terorganisir rapih, tetapi apabila tokoh masyarakat tidak mampu menggerakkannya, maka rencana tidak dapat berjalan dengan baik. Fungsi menggerakkan ini berkaitan erat dengan kemampuan berkomunikasi tokoh masyarakat tersebut. 4) Fungsi Mengorganisasi. Fungsi ini mengarah kepada pengelompokan sumber-sumber yang ada di wilayahnya, baik sumber manusia maupun non manusia dalam rangka mencapai tujuan bersama, termasuk mengorganisasi sumber-sumber dalam rangka mengatasi masalah. (Nurhayani, 2019)

Buvinic (1997) melalui penelitiannya bahwa salah satu hambatan kebanyakan wanita di seluruh dunia untuk meningkatkan perekonomian mereka, adalah tidak memiliki waktu senggang untuk berinvestasi dalam pekerjaan tambahan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini terkait dengan peran reproduktif yang menjadi tanggung-jawab kaum perempuan, disamping peran produktif WRSE sebagai kepala rumah tangga yang harus menghidupi keluarganya. Rendahnya kesadaran WRSE akan pentingnya program peningkatan kapasitas untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan dapat juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang memberikan pengaruh terhadap pola pikir mereka.

Faktor usia, pada umumnya WRSE di desa ini usianya tidak lagi muda, sehingga upaya untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan mereka melalui program-program pelatihan

tidak lagi diminati mengingat usia mempengaruhi tenaga dan motivasi mereka untuk hidup lebih baik. Faktor penghambat terakhir adalah terbatasnya akses WRSE pada lembaga finansial untuk mempermudah mereka mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha. (fajarwati, Sari, Soewarno 2017)

Dari berbagai macam permasalahan yang dialami Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) ini, saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah berdampak dan berpengaruh dukungan sosial yang diberikan kepada PRSE ini oleh tokoh masyarakat. Juga apakah membantu para PRSE untuk bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Karena jumlah PRSE yang terbilang cukup banyak adanya.

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Berdasarkan fenomena yang diperoleh tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Dukungan Sosial Tokoh Masyarakat Terhadap Bantuan Sosial Tunai (BST) Kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang: **“Dukungan Sosial Tokoh Masyarakat Terhadap Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung”** dengan mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk dukungan sosial yang diberikan tokoh masyarakat melalui Program Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?

2. Apa faktor penghambat dukungan sosial yang diberikan tokoh masyarakat melalui Program Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana implementasi praktis dan teoritis tentang peran Pekerja Sosial dalam Program Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang: **“Dukungan Sosial Tokoh Masyarakat Terhadap Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung”** adalah untuk menganalisis:

1. Mendeskripsikan bentuk dukungan sosial yang diberikan tokoh masyarakat melalui Program Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
2. Mendeskripsikan faktor penghambat dukungan sosial yang diberikan tokoh masyarakat melalui Program Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
3. Mendeskripsikan implementasi praktis dan teoritis tentang peran Pekerja Sosial dalam Program Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Segala bentuk penelitian ilmiah kehidupan sosial dirancang untuk kesempurnaan suatu deskripsi permasalahan sosial. Penelitian ini dibutuhkan untuk memberikan manfaat yang signifikan dalam suatu kondisi realitas kehidupan sosial. Sebuah harapan untuk peneliti agar penelitian ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ide bagi pengembangan teori-teori dan konsep kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan dukungan sosial untuk Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang ada di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung melalui Dukungan Sosial yang diberikan oleh Tokoh Masyarakat. Karena pada dasarnya dukungan sosial merupakan hal yang tidak akan bisa lepas dari keberadaan pekerjaan sosial, yang mana keberadaan dari dukungan sosial ini sangatlah penting dan dibutuhkan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) seharusnya akan lebih baik bila memiliki keterampilan, dan pengetahuan untuk bisa mempertahankan hidupnya dan keluarganya. Maka dari itu peran Tokoh Masyarakat ini sangatlah penting dalam membantu mereka melalui aspek-aspek yang ada di dalam Dukungan Sosial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang gambaran bentuk Dukungan Sosial Tokoh Masyarakat. Serta memberikan sumbangan pemikiran agar tokoh masyarakat di Desa Cinunuk dapat memberikan dukungan sosial baik berupa kepedulian, penghargaan, bantuan materi maupun informasi yang dibutuhkan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

1.4 Kerangka Konspetual

Masalah sosial yang terjadi di masyarakat pada umumnya adalah kemiskinan, salah satunya yaitu permasalahan tentang Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). Menurut W.A. Friedlander yang dikutip oleh Fahrudin (2012:9) mengembangkan tentang pengertian Kesejahteraan Sosial yaitu:

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu kelompok untuk mencapai standar hidup, untuk mencapai standar kesejahteraan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan sepenuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa masalah sosial sangat mengganggu, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial dan merupakan tanggung jawab profesi ini. Kesejahteraan sosial merupakan salah satu unsur penting di dalam kegiatan pembangunan sosial, oleh karena itu diperlukan system yang lebih teratur agar dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa usaha kesejahteraan sosial mengacu pada keadaan, usaha, serta pelayanan yang secara nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Usaha kesejahteraan sosial dapat diarahkan pada individu, keluarga, kelompok ataupun komunitas. Terkait dengan bidang kesejahteraan sosial maka profesi yang terkait adalah pekerjaan sosial, adapun pengertian pekerjaan sosial menurut Zastrow (1999) yang dikutip dari Suharto (2009:1) yaitu:

Pekerjaan sosial adalah aktivitas professional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi – kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pekerjaan social merupakan profesi profesional yang medampingi masyarakat dalam menangani masalah – masalah sosial yang dihadapi sehingga dapat mencapai keberfungsian sosialnya Keberfungsian sosial merupakan sebuah kondisi dimana masyarakat dapat menjalankan peran sosialnya, mampu memenuhi

kebutuhan hidupnya, dan mampu memecahkan masalah – masalahnya. Adapun definisi keberfungsian sosial menurut Suharto dkk yang dikutip dari Suharto (2014:28) yaitu:

Keberfungsian sosial sebagai kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi guncangan dan tekanan (*shock and stresses*). menjalankan peranan sosialnya serta menghadapi berbagai masalah- masalah sosial yang ada.

Seseorang yang berfungsi secara sosial tentunya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha - usaha yang dilakukannya dalam mencapai pemenuhan kebutuhan tersebut. Individu, keluarga, kelompok, masyarakat maupun lembaga yang berfungsi secara sosial bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi juga mampu memecahkan dan menghadapi masalah sosial yang ada. Masalah secara luas dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya (Jensen, 1992 dalam Suharto, 2014:83). Adapun masalah sosial menurut Soetomo (2013:28), sebagai berikut:

Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat, fenomena tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak dikehendaki, oleh karenanya wajar kalau kemudian selalu mendorong adanya usaha untuk mengubah dan memperbaikinya.

Berdasarkan definisi di atas dapat di lihat bahwa masalah sosial merupakan sebuah ketidak sesuaian yang di kehendaki dalam masyarakat, masalah sosial muncul karena aturan-aturan dan nilai-nilai yang ada tidak dapat dilakukan dengan baik atau tidak terjadinya interaksi sosial. Pernyataan di atas menjelaskan bahwa fungsi remaja selain mewujudkan kesejahteraan sosial juga bertujuan supaya makin meningkatkan pelaksanaan fungsi sosial sebagai manusia-manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya melalui usaha-usaha pencegahan, pelayanan dan pengembangan sosial.

Dukungan sosial adalah informasi atau umpan balik dari orang lain yang menunjukkan bahwa seseorang dicintai dan diperhatikan, dihargai, dan dihormati, serta dilibatkan dalam jaringan komunikasi dan kewajiban yang timbal balik. Dukungan sosial juga berarti dukungan atau bantuan yang berasal dari orang yang memiliki hubungan sosial akrab dengan individu yang menerima bantuan. Bentuk dukungan ini dapat berupa informasi, tingkah laku tertentu, ataupun materi yang dapat menjadikan individu yang menerima bantuan merasa disayangi, diperhatikan dan bernilai.

Pelaksanaan proses dukungan sosial melibatkan berbagai dimensi yang ada di setiap pihak yang terlibat di dalamnya, adapun pengertian dukungan sosial yang lain menurut Cohen dan Syme (1985:29) sebagai berikut:

Dukungan sosial adalah hubungan antar individu yang didalamnya terdapat saling memberi bantuan, kepercayaan, dan saling menghargai. Dukungan sosial akan membuat individu dapat memahami dirinya dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi karena bantuan atau keberadaan individu lain.

Dengan adanya rasa kepercayaan dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya menjadikan dukungan sosial sebagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Kesulitan yang dihadapi akan jauh terasa lebih mudah untuk diselesaikan dengan adanya aspek-aspek dukungan sosial ini yang memberikan rasa peduli terhadap satu sama lain. Tidak acuh terhadap apa masyarakat yang membutuhkan, adapun menurut Johnson dan Johnson dikutip oleh Mekar Dwi Anggraeni (2009:95) sebagai berikut:

Dukungan sosial adalah pemberian bantuan seperti materi, emosi, dan informasi yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia. Selain mengadakan kontak-kontak sosial manusia juga membutuhkan dukungan dari orang lain dalam mengantisipasi dan menghadapi suatu masalah.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa dukungan sosial melibatkan juga beberapa aspek lainnya seperti materi, emosi dan informasi. Materi disini berarti apa yang dibutuhkan oleh orang lain tersebut untuk itu diperlukan emosi antar sesama individu, dengan

ikatan yang kuat maka dukungan sosial ini akan berjalan dengan baik serta informasi yang dapat membantu individu tersebut untuk mencapai kesejahteraan di dalam hidupnya.

Dukungan sosial terdiri dari beberapa bentuk, menurut Sarafino (2006) terdapat lima bentuk dukungan sosial, yaitu:

1. Dukungan Emosional
Terdiri dari ekspresi seperti perhatian, empati, dan turut prihatin kepada seseorang. Dukungan ini akan menyebabkan penerima dukungan merasa nyaman, tenteram kembali, merasa dimiliki dan dicintai ketika dia mengalami stres, memberi bantuan dalam bentuk semangat, kehangatan personal, dan cinta.
2. Dukungan Penghargaan
Dukungan ini dapat menyebabkan individu yang menerima dukungan membangun rasa menghargai dirinya, percaya diri, dan merasa bernilai. Dukungan jenis ini akan sangat berguna ketika individu mengalami stres karena tuntutan tugas yang lebih besar daripada kemampuan yang dimilikinya.
3. Dukungan Instrumental
Merupakan dukungan yang paling sederhana untuk didefinisikan, yaitu dukungan yang berupa bantuan secara langsung dan nyata seperti memberi atau meminjamkan uang atau membantu meringankan tugas orang yang sedang stres.
4. Dukungan Informasi
Orang-orang yang berada di sekitar individu akan memberikan dukungan informasi dengan cara menyarankan beberapa pilihan tindakan yang dapat dilakukan individu dalam mengatasi masalah yang membuatnya stres.
5. Dukungan Kelompok
Merupakan dukungan yang dapat menyebabkan individu merasa bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok dimana anggota-anggotanya dapat saling berbagi.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui tentang dukungan sosial memiliki aspek – aspek tertentu yaitu yang pertama adalah dukungan emosional yang memberikan rasa nyaman dalam memberikan rasa seperti empati dan semangat untuk individu tersebut, lalu ada dukungan Penghargaan tentunya agar individu tersebut dapat menerima dirinya dan menjadikan dirinya menjadi lebih percaya diri, selanjutnya dukungan instrumental yaitu bantuan yang diberikan dengan sukarela seperti bantuan yang dibutuhkan berupa barang / uang dan seperti bantuan jasa untuk mereka, lalu dukungan informasi ini bertujuan untuk bagaimana seharusnya tindakan / rencana yang akan dibuat kedepannya, yang terakhir yaitu dukungan kelompok

membuat individu tersebut merasa dianggap dan ada menjadikan individu tersebut menjadi lebih percaya diri menjadi bagian dari suatu kelompok tersebut.

Salah satu pihak yang bisa memberikakan dukungan sosial adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat adalah mereka yang memiliki kedudukan sosial dan dihormati di lingkungannya. Mereka disebut tokoh masyarakat karena memiliki kedudukan serta pengaruh dan diakui oleh masyarakat. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukannya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah. Sedang pengertian tokoh masyarakat menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) bahwa bahwa tokoh masyarakat ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian untuk memahami dengan baik, siapa dan apa yang menyebabkan seseorang disebut sebagai tokoh masyarakat paling tidak disebabkan oleh lima hal yaitu:

Pertama, kiprahnya di masyarakat sehingga yang bersangkutan ditokohkan oleh masyarakat yang berada di lingkungannya. Dengan ketokohnya itu, maka masyarakat memilihnya untuk menduduki posisi-posisi penting di masyarakat mulai dari ketua RT, ketua RW, ketua organisasi kepemudaan, ketua masjid pemimpin organisasi kemasyarakatan yang berakar di masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain, termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh organisasi kedaerahan, tokoh lingkungan, tokoh dari suatu kawasan, tokoh keturunan darah biru, tokoh pekerja, tokoh pergerakan dan lain-lain. Dengan ketokohnya, ada yang mencalonkan diri dan dicalonkan oleh partai politik untuk menjadi calon anggota parlemen di semua tingkatan.

Menurut Umar (2013), tokoh masyarakat adalah mereka yang memiliki kedudukan sosial dan dihormati di lingkungannya. Mereka disebut tokoh masyarakat karena memiliki kedudukan serta pengaruh dan diakui oleh masyarakat. Selanjutnya dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 1987 tentang Protokol Pasal 1 ayat (6), bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukannya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah. Sedangkan di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Pasal 39 ayat (2), bahwa tokoh masyarakat adalah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian. Jadi, yang dimaksud tokoh masyarakat adalah pemimpin informal, karena statusnya sebagai pemimpin tidak didasarkan atas pengangkatan formal, namun diterima sebagai pemimpin karena kualitasnya mampu mempengaruhi orang lain. Mereka ditokohkan karena memiliki pengaruh/wibawa/kharisma dihadapan masyarakatnya.

dikemukakan Hanafi (1987:113-114), yaitu:

1) Tokoh masyarakat memiliki hubungan sosial lebih luas daripada pengikutnya. Mereka lebih sering berhadapan dengan media massa, lebih sering mengadakan perjalanan keluar dan lebih sering berhubungan dengan agen pembaharu. 2) Tokoh masyarakat memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi orang kebanyakan, terutama pengikutnya. Salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian itu adalah dengan jalan membuka pintu bagi masuknya ide-ide baru, dan pintu masuk itu adalah hubungan dengan dunia luar. 3) Tokoh masyarakat tidak menyimpan pengetahuan dan keahlian itu untuk diri sendiri, melainkan berusaha untuk menyebarkannya kepada orang lain. Mereka menjadi tumpuan bertanya dan meminta nasihat. (Iubis, 2019)

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan bagaimana proses dukungan sosial yang diberikan oleh tokoh masyarakat dalam upaya mendorong kemandirian para Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). Juga ingin mengetahui bagaimana peran Tokoh Masyarakat terhadap Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan oleh pemerintah. Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis data sekunder berupa data dari sumber resmi untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini.

Menurut Alwasilah (2012:100) metode penelitian kualitatif berfokus pada fenomena tertentu yang tidak memiliki *generalizability* dan *comparability*, tetapi memiliki internal *validity* dan *contextual understanding*. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut Moleong (2011:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, sejalan dengan yang diungkapkan oleh Nazir (2011:57) menyatakan bahwa: “Studi Kasus, atau penelitian kasus (*case study*), adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat”. Dengan demikian, penelitian studi kasus ini akan mencoba mengungkap bagaimana Peran Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Desa Cinunuk.

Tujuan dari penggunaan metode penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana Dukungan Sosial Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Desa Cinunuk. Peneliti tidak melihat benar atau salah, namun menganggap bahwa semua data yang didapatkan dari hasil penelitian dari data sekunder yang bersumber dari jurnal, buku dan website resmi lainnya adalah data yang akurat.

1.5.2 Sumber dan Jenis Data

Data merupakan penunjang penelitian agar hasil penelitian lebih akurat sesuai dengan fenomena sosial yang nyata. Dari mana data berasal merupakan hal yang mesti diperhatikan, dengan kata lain sumber data pada penelitian.

Penelitian di dalamnya memiliki acuan dari mana asal data-data yang diperoleh atau sumber data, selain itu terdapat rangkaian informasi yang dibutuhkan atau jenis data oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan penelitian ini.

Adapun sumber dan jenis data penelitian ini, sebagai berikut:

1.5.2.1.1 Sumber Data

Dibutuhkan data agar hasil penelitian lebih akurat sesuai dengan fenomena sosial yang diteliti dan sesuai dengan kenyataan yang sedang terjadi. Alwasilah (2012: 107) menyatakan bahwa: “Sumber data tidak ada persamaan atau hubungan deduktif antara pertanyaan penelitian dan metode pengumpulan data”. Sumber data berupa survei, eksperimen, dokumen, arsip dan lainnya. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Studi Literatur, Yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.
2. Data sekunder, yaitu sumber data tambahan, diantaranya:
 - a. Sumber tertulis dibagi atas buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dan dokumen resmi.
 - b. Pengamatan keadaan fisik lokasi penelitian.

1.5.2.2 Jenis Data

Jenis data akan dibagi berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian agar mampu mendeskripsikan serta mengidentifikasi permasalahan yang diteliti sehingga dapat menjelaskan data lebih terperinci, agar dapat melakukan penelitian secara optimal peneliti membagi informasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan sumber data yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Jenis data akan diurai berdasarkan identifikasi masalah supaya mampu menjelaskan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijelaskan dengan lebih terperinci sebagai berikut:

Tabel 1.1 Informasi dan Jenis Data

No.	Informasi yang dibutuhkan	Jenis data	Informan
1.	Apa bentuk Dukungan Sosial Tokoh Masyarakat Terhadap Bantuan Sosial Tunai (BST) Kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Emosional • Dukungan Penghargaan • Dukungan Instrumental • Dukungan Informatif • Dukungan Kelompok 	Tokoh Masyarakat dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
2.	Apa faktor penghambat Dukungan Sosial Tokoh Masyarakat Terhadap Bantuan Sosial Tunai (BST) Kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor Eksternal 	Tokoh Masyarakat
3.	Bagaimana implementasi praktis dan teoritis tentang peran Pekerja Sosial dalam Program Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • Peran-Peran Pekerja Sosial 	Pekerja Sosial

Sumber: studi literatur, 2022

Jenis data pada tabel 1.1 tersebut yang akan digali dalam penelitian tentang proses Dukungan Sosial Tokoh Masyarakat Terhadap Bantuan Sosial Tunai (BST) Kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memperoleh, mengumpulkan, menganalisis, dan memperkaya keabsahan datanya agar dapat dipertanggungjawabkan, menggunakan teknik-teknik yang di dalamnya sesuai dengan konsep dan pendekatan penelitian kualitatif ini.

Teknik pengumpulan data diberlakukan agar dapat mempermudah peneliti. Dijelaskan oleh Creswell (2016: 254-255) menyatakan prosedur pengumpulan data dalam penelitian pemelitan kuitatif melibatkan empat jenis, yaitu :

1. Dokumen-dokumen kualitatif (*qualitative documents*), dokumen ini berupa dokumen publik (misalnya, koran, makalah, laporan, kantor) ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, *e-mail*).
2. Materi audio dan visual kualitatif (*qualitative audio and visual materials*), data ini bisa berupa foto, objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian mengenai Dukungan Sosial Tokoh Masyarakat Terhadap Bantuan Sosial Tunai (BST) Kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

ini terbagi menjadi beberapa Teknik, seperti yang dijelaskan oleh Creswell (2016: 264-267) dalam model ini ada enam langkah analisis, yaitu:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.

3. Memulai *coding* semua data. *Coding* merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan pertolongan (atau bagian teks atau bagian gambar) dan menuliskan kategori dalam batas- batas (Rossman & Rallis, 2012). Langkah ini melibatkan pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat (atau paragraf) atau gambar tersebut kedalam kategori, kemudian melabeli kategori ini dengan istilah khusus.
4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan setting (ranah), orang (partisipan), kategori, dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam setting (ranah) tertentu. Peneliti dapat membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi ini, lalu menganalisisnya untuk proyek studi kasus, etnografi, atau penelitian naratif. Setelah itu, terapkan proses *coding* untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori.
5. Pendekatan paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema tertentu.
6. Interpretasi dalam penelitian kualitatif (*interpretation in qualitative research*) atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti pelajaran apa yang bisa diambil semua ini?" akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan (Lincoln & Guba, 1985). Pelajaran ini dapat berupa interpretasi pribadi peneliti, dengan berpijak pada kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan, sejarah, dan pengalaman pribadinya kedalam penelitian.

1.5.5 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah validitas data atau keabsahan data. Berdasarkan validitas

data atau keabsahan data yang dijelaskan menurut Alwasilah (2012:130-133) maka peneliti menggunakan beberapa strategi validitas, yaitu:

1. Mentriangulasi (*triangulate*) sumber data informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Jika tema-tema dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan, maka proses ini dapat menambah validitas penelitian.
2. Menerapkan *member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. *Member checking* ini dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi atau tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan / deskripsi / tema tersebut sudah akurat.
3. Membuat deskripsi yang padat (*thick description*) tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan ranah (*setting*) penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan.
4. Masukan, asupan atau *Feedback* merupakan sebuah cara untuk mendapat masukan, saran, kritik, dan komentar dari orang lain. Semua itu sangat dianjurkan untuk mengidentifikasi ancaman terhadap validitas, bias dan asumsi peneliti, serta kelemahan-kelemahan logika peneliti yang sedang dilakukan.

1.5.6 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di tempat yang telah dipilih oleh peneliti berdasarkan alasan-alasan tertentu dan di rentang waktu yang direncanakan juga dirumuskan sehingga sesuai dengan perjalanan penyusunan penelitian. Adapun lokasi dan waktu penelitian ini, sebagai berikut:

